

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

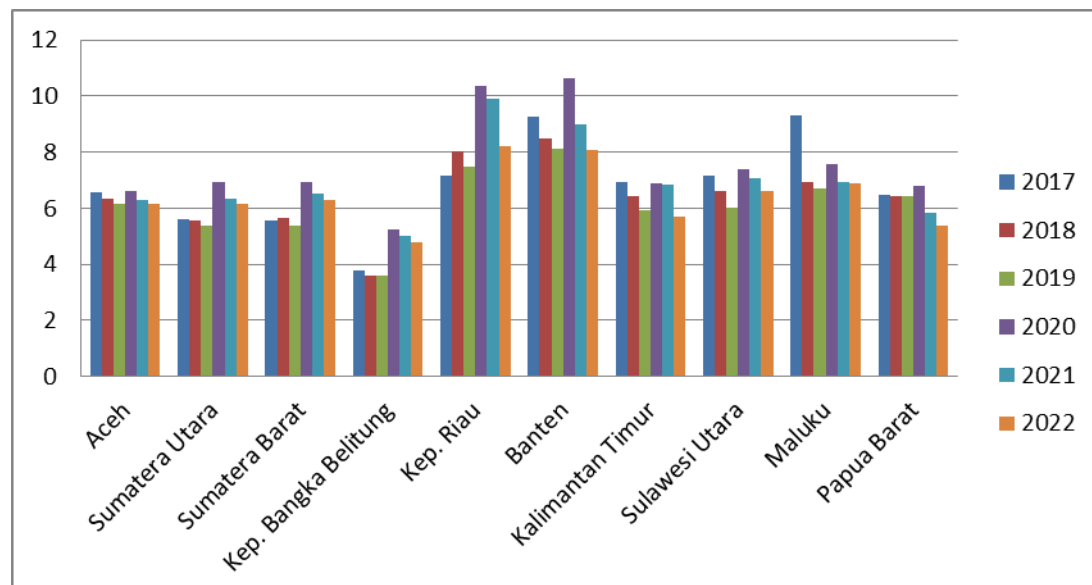
Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar ke empat di dunia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 265 juta jiwa. Dengan banyaknya jumlah penduduk di Indonesia muncul juga berbagai permasalahan diantaranya masalah pengangguran. Pengangguran merupakan salah satu masalah yang paling krusial dalam suatu perekonomian baik di negara maju maupun negara berkembang, yang sangat penting dimasukkan ke dalam perencanaan pembangunan.

Peningkatan jumlah pengangguran disebabkan oleh menurunnya persentase pertumbuhan ekonomi. Penurunan persentase pertumbuhan ekonomi akan berdampak terhadap penurunan penyerapan tenaga kerja. Apabila tenaga kerja tidak diserap dengan optimal, maka akan menimbulkan permasalahan pengangguran. Masalah pengangguran dapat terjadi sebagai akibat dari perubahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan perluasan lapangan kerja. Salah satu indikator tingginya angka pengangguran dapat di lihat dari lamanya pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Berkaitan dengan permasalahan pengangguran, maka ada beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu (i) kapasitas atau kemampuan keterampilan pencari kerja yang tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh pasar tenaga kerja, (ii) kesempatan kerja yang merupakan lapangan kerja yang di isi dengan kegiatan ekonomi. Keadaan di negara berkembang dalam beberapa

dasawarsa menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak mampu menciptakan kesempatan kerja yang lebih cepat dari pertumbuhan penduduk. Oleh karenanya, masalah pengangguran yang dihadapi dari tahun ke tahun semakin lama semakin bertambah serius (Sukirno, 2016).

Penulis mengambil 10 Provinsi untuk dijadikan sebagai objek penelitian, dikarenakan 10 Provinsi tersebut merupakan Provinsi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang mengalami fluktuasi setiap tahunnya, investasi dan angka melek huruf yang juga ikut berfluktuasi, sedangkan upah minimum memiliki perkembangan yang baik setiap tahunnya. Hal ini yang dapat menyebabkan tingkat pengangguran terbuka terus saja mengalami peningkatan di beberapa wilayah yang dijadikan objek penelitian.

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di 10 Provinsi Indonesia dapat dilihat pada Grafik berikut ini:



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 1.1
Grafik Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan Gambar 1.1 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Provinsi yang ada di Indonesia tahun 2021 yaitu di Provinsi Aceh pada tahun 2018-2019 tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah lapangan pekerjaan. Namun, pada tahun 2020 tingkat pengangguran kembali meningkat dan itu hanya terjadi setahun saja. Setelah itu pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2021 tingkat pengangguran mengalami penurunan kembali. Di Provinsi Sumatera Utara, tingkat pengangguran mengalami penurunan dari tahun 2018-2019. Namun, pada tahun 2020 terjadinya peningkatan sebesar 6,91%. Pada tahun 2021 tingkat pengangguran kembali lagi mengalami penurunan sebesar 6,33 dikarenakan perekonomian di Provinsi tersebut sudah kembali stabil sehingga pembangunan ekonomi berjalan cukup baik.

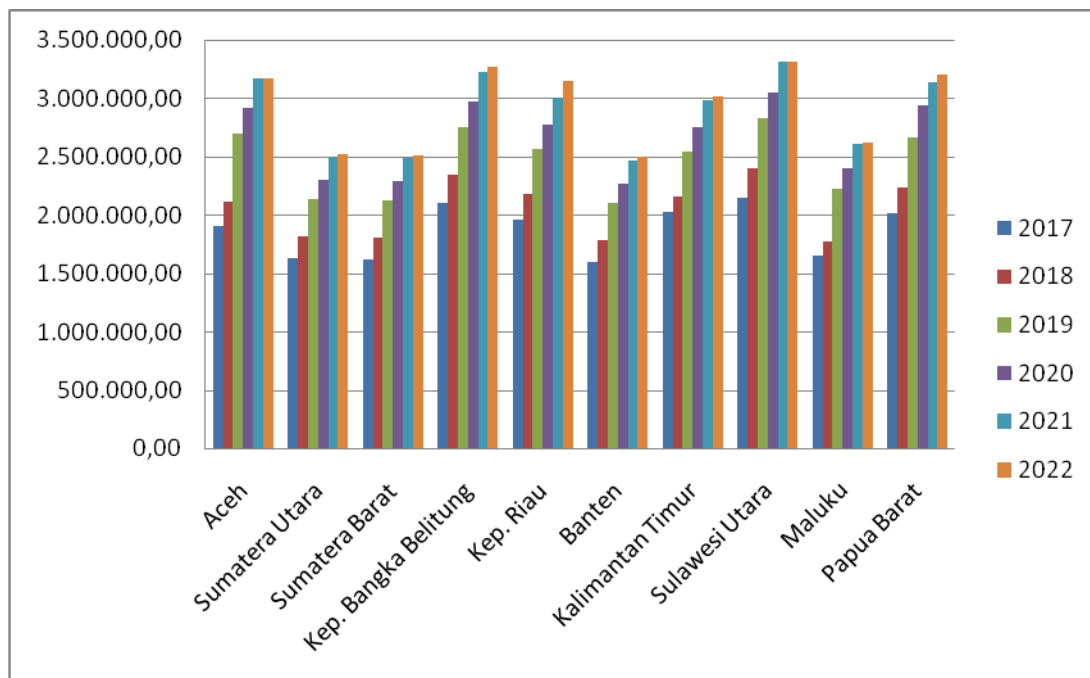
Selanjutnya tingkat pengangguran yang paling tinggi sekali di Indonesia yaitu berada di Provinsi Banten pada tahun 2020 dengan tingkat pengangguran sebesar 10,64%. Artinya masih banyak jumlah tenaga kerja yang menganggur di Provinsi tersebut, walaupun pada tahun 2021 tingkat pengangguran mengalami penurunan hanya sampai 8,98% saja. Pada tahun 2018-2019 di Provinsi Kalimantan Timur tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan sebesar 5,94%. Pada tahun 2020-2021 tingkat pengangguran mengalami peningkatan dan penurunan sebesar 6.87%-6.83%. sedangkan di Sulawesi Utara, Maluku dan Papua Barat penurunan tingkat pengangguran terbuka terjadi pada tahun 2018-2019 dan kembali di ikuti pada tahun 2021. Jadi dapat disimpulkan bahwa di kep. Bangka Belitung pada tahun 2021 jumlah tenaga kerja berbanding seimbang dengan lapangan pekerjaan.

Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Malthus (dalam Hartanto dan Masjkuri, 2017) yang menyatakan bahwa manusia akan saling bersaing dalam menjamin keberlangsungan hidupnya, dimana kondisi ini diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menghasilkan tenaga kerja yang semakin banyak dan apabila tidak diimbangi dengan adanya lapangan pekerjaan yang cukup luas serta penyerapan tenaga kerja yang cenderung menurun menyebabkan persaingan dalam memperoleh pekerjaan dan yang tersisih dalam persaingan tersebut akan menjadi golongan penganggur atau disebut sebagai pengangguran terbuka.

Salah satu faktor yang mempengaruhi pengangguran terbuka adalah upah minimum provinsi. Pemerintah senantiasa membuat kebijakan yang dapat meningkatkan taraf hidup pekerja dengan tingkat upah yang layak. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menetapkan kebijakan tingkat upah minimum. Tingkat upah minimum ditetapkan secara sektoral dan regional. Dahulu upah minimum provinsi dikenal dengan istilah Upah Minimum Regional Tingkat dan berubah menjadi Upah Minimum Provinsi (Arsyad, 2014).

Tingkat upah minimum yang ditetapkan di atas tingkat upah rata-rata yang diperoleh pekerja akan menyebabkan pengusaha mengurangi penggunaan tenaga kerja sehingga penyerapan tenaga kerja akan berkurang. Di pasar tenaga kerja, penawaran, tenaga kerja oleh masyarakat akan lebih besar dari pada permintaan tenaga kerja oleh pengusaha. Sehingga, akan terjadi pengangguran. Pengangguran umumnya adalah masalah yang banyak dihadapi negara-negara yang sedang berkembang seperti di Indonesia. Pengangguran yang terjadi dapat menyebabkan

kurangnya kesejahteraan masyarakat karena tidak adanya penghasilan untuk memenuhi kebutuhan Primer. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik keamanan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 1.2
Grafik Perkembangan Upah Minimum Provinsi

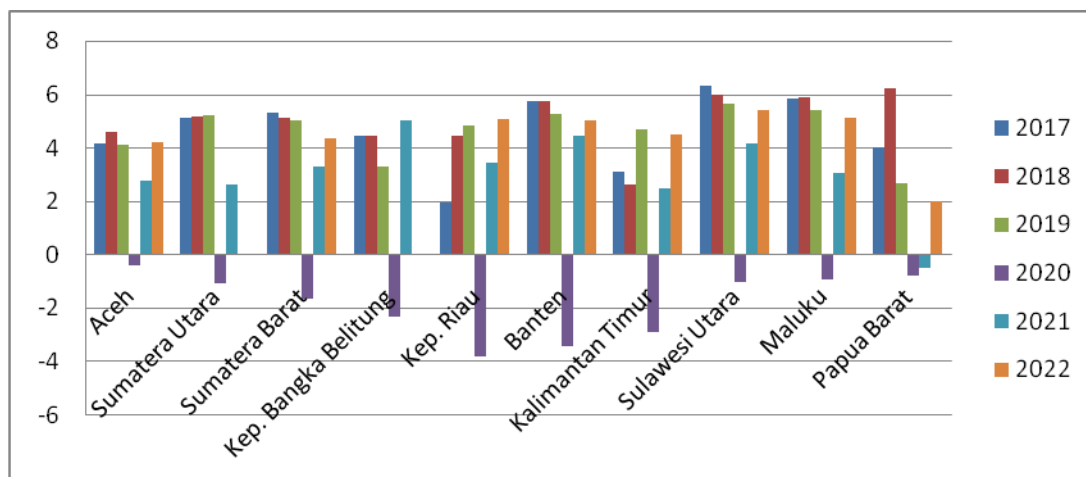
Berdasarkan grafik diatas, diketahui bahwa upah minimum provinsi dalam 10 provinsi di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Di Provinsi Aceh peningkatan dimulai dari tahun 2018-2021 dengan jumlah peningkatan tahun 2020-2021 sebesar Rp.2.916.810,00-Rp.3.165.030,00. Di Provinsi Sumatera Utara sampai Papua Barat upah minimum mengalami peningkatan dari tahun 2018-2021 dengan jumlah peningkatan di masing-masing provinsi pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp.2.499.423,00 sampai dengan Rp.3.134.600,00 di Papua Barat. Namun yang menjadi fenomenanya adalah peningkatan upah minimum provinsi tidak seimbang

dengan perkembangan tingkat pengangguran terbuka yang mengalami fluktuasi. Seperti pada tahun 2020 adanya peningkatan tingkat pengangguran terbuka di Aceh, akan tetapi upah minimum Provinsi masih mengalami peningkatan. Artinya adanya dampak positif dan negatif dari kenaikan UMP. Dampak positif dari penetapan upah dilihat dari kenaikan upah yang mengakibatkan penawaran tenaga kerja meningkat dan jumlah pengangguran akan berkurang. Sedangkan dampak negatif dari penetapan upah adalah saat upah naik maka akan berakibat pada penurunan jumlah pekerja karena perusahaan akan mengurangi jumlah pekerja. Sehingga jumlah pengangguran akan meningkat (Maring, 2017).

Faktor lain yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka yaitu pertumbuhan ekonomi. Menurut Amir (2018) perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang terus menunjukkan peningkatan menggambarkan bahwa perekonomian wilayah tersebut berkembang dengan baik.

Suatu wilayah yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan meningkat, dapat menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas melalui industri-industri yang bersifat padat karya sehingga tingkat partisipasi angkatan kerja yang ada mampu terserap dengan baik dan mengurangi angka pengangguran yang ada. Hukum Okun yang menyatakan bahwa setiap penurunan 2 persen PDRB yang berhubungan dengan PDRB potensial, angka pengangguran meningkat 1 persen, begitupun sebaliknya dengan kata lain secara tidak langsung bahwa nilai PDRB

berarti membuka peluang perluasan kesempatan kerja di suatu wilayah. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi 10 Provinsi dapat dilihat pada Grafik berikut ini:



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 1.3
Grafik Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi

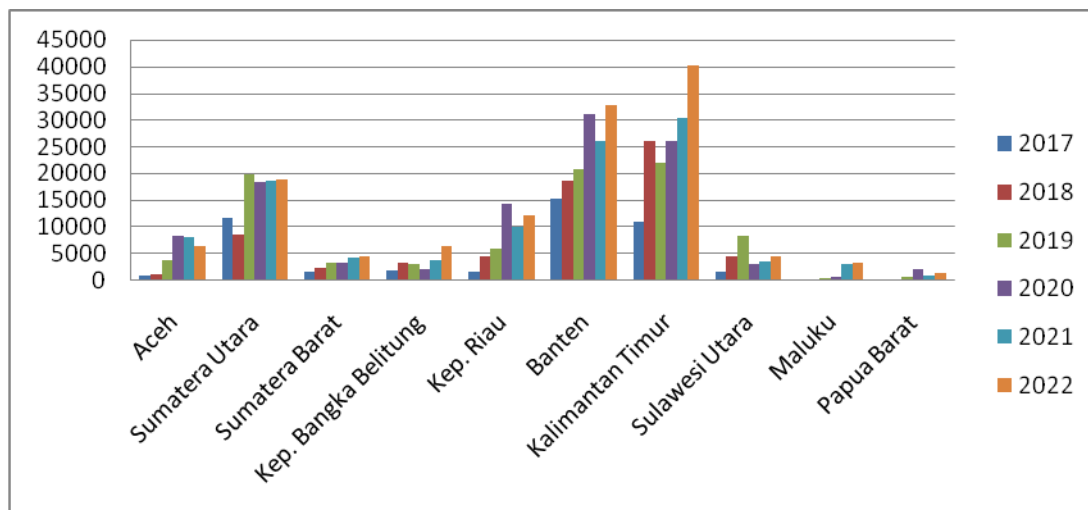
Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa perkembangan pertumbuhan ekonomi di 10 Provinsi Indonesia mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Dimana di Provinsi Aceh pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 4,61%, pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami permasalahan yang sangat rumit dimana nilai pertumbuhan ekonomi sebesar -0,37%. Dikarenakan pada masa itu di Indonesia sedang mengalami wabah Covid-19. Permasalahan pertumbuhan ekonomi juga terjadi di tahun yang sama yaitu tahun 2020 di Provinsi Sumatera Utara sebesar -1,07%, Provinsi Sumatera Barat sebesar -1,62%, Provinsi Kep. Bangka Belitung sebesar -2,30, Provinsi Kep. Riau sebesar -3,80 sampai dengan Provinsi Papua Barat sebesar -0,76%, di provinsi Papua Barat permasalahan pertumbuhan ekonomi terjadi sampai tahun 2021 sebesar -,051%. Hal ini disebabkan oleh perekonomian Indonesia pada masa Pandemi mengalami deflasi atau penurunan

drastis. Hal ini menyebabkan kebijakan pemerintah dalam penanganan di bidang ketenagakerjaan masih tergolong lemah, tingginya pengangguran tidak bisa diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan serta kesempatan kerja yang dibuka. Seharusnya Ketika pertumbuhan ekonomi tinggi maka tenaga kerja yang terserap juga akan tinggi sehingga jumlah pengangguran berkurang. Pertumbuhan ekonomi dapat dihitung berdasarkan perubahan jumlah Produk Domestik Regional Bruto. Menurut penelitian Suhendra dan Wicaksono (2016) yang menyatakan bahwa pengangguran berhubungan juga dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, ketersediaan lapangan kerja berhubungan dengan investasi, sedangkan investasi didapat dari akumulasi tabungan, tabungan adalah sisa dari pendapatan yang tidak dikonsumsi. Semakin tinggi pendapatan nasional, maka semakin besarlah harapan untuk pembukaan kapasitas produksi baru yang tentu saja akan menyerap tenaga kerja baru.

Jumlah pengangguran yang tinggi dan terdapat perbedaan di tiap provinsi perlu menjadi perhatian lebih. Setiap waga negara memerlukan terpenuhi kebutuhan dasar dan supaya dapat aktif memaksimalkan potensi ekonomi. Jumlah lapangan kerja yang lebih kecil dibanding jumlah angkatan kerja menciptakan tenaga kerja yang menjadi pengangguran. Seharusnya kebijakan fiskal pemerintah menitikberatkan pada pemerataan investasi di bidang ekonomi daerah. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka adalah investasi.

Nilai investasi adalah suatu kegiatan yang sangat penting karena menunjang produksi, sehingga investasi dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dan cepat atau lambatnya pembangunan dapat diukur dari

investasi (Sari, 2016). Keterkaitan investasi bagi tingkat pengangguran terbuka yaitu Teori Harrod-Domar yang menyatakan bahwa semakin besar pendapatan yang ditabung dan diinvestasikan, laju pertumbuhan ekonomi akan semakin cepat dan memberikan dampak baik bagi pengurangan pengangguran (Todaro & Smith, 2011). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa investasi merupakan komponen penting dalam meningkatkan produktivitas sehingga pertumbuhan ekonomi akan meningkat dan mengurangi jumlah pengangguran. Perkembangan Investasi di 10 Provinsi Indonesia dapat dilihat pada Grafik berikut ini:



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 1.4
Grafik Perkembangan Investasi

Berdasarkan grafik diatas, diketahui bahwa perkembangan investasi di 10 Provinsi Indonesia mengalami fluktuasi. Hanya 2 provinsi yang nilai investasinya mengalami peningkatan yaitu Provinsi Aceh dan Sumatera Barat. Sedangkan Provinsi Sumatera Utara, Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau, Banten, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Maluku dan Papua Barat perkembangan investasi nya mengalami fluktuasi, dimana hal tersebut terlihat sangat jelas di dua Provinsi yaitu

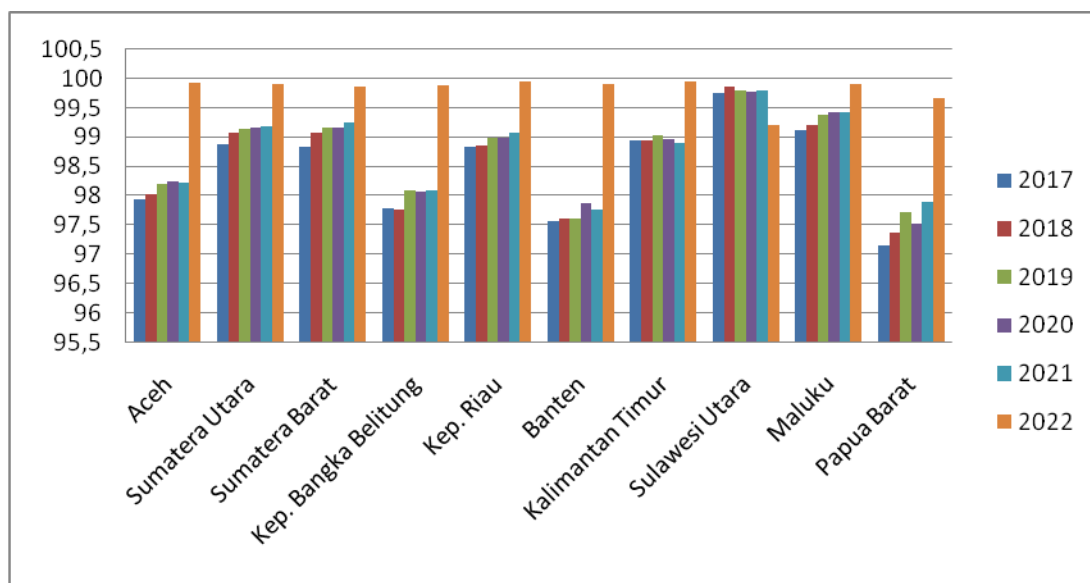
Maluku dan Papua Barat di tahun 2018-2021 jumlah investasi mengalami penurunan di tahun 2018 sebesar Rp.283,2 dan kembali meningkat di tahun 2020-2021 sebesar Rp.474,8-Rp.2939,7. Di Papua Barat di tahun 2018-2021 jumlah investasi mengalami penurunan di tahun 2018 sebesar Rp.50,9 dan kembali menurun di tahun 2021 sebesar Rp.635,6.

Berdasarkan teori investasi sangat diperlukan untuk mengurangi tingkat pengangguran dikarenakan Masalah pengangguran juga berhubungan dengan investasi upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat pengangguran ialah dengan mendorong tingkat investasi baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Seperti mendorong tumbuhnya bisnis atau pendirian pabrik, adanya supply teknologi dari investor baik dalam bentuk produksi atau permesinan dan menciptakan lapangan pekerjaan (Lusiana, 2012).

Kemudian faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran adalah Angka Melek Huruf (Pendidikan). Pengangguran menjadi masalah dalam pembangunan yang mempengaruhi (*Human Development Index*). Pengangguran juga dapat menjadi efek yang cukup serius bagi pembangunan manusia karena masalah pengangguran merupakan sebuah masalah yang kompleks yang sebenarnya bermula dari kemampuan seseorang. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk yang rendah kualitas SDM, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang murah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktifitas yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan pekerjaan (Dickson, 2019).

Menurut Septiana dkk (2015) pendidikan yang lebih luas adalah modal manusia dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan. Hal ini karena keberhasilan pendidikan juga bertumpu pada kesehatan yang baik, dimana kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan dan pendidikan merupakan inti dari mencapai kehidupan yang memuaskan dan berharga. Sementara keberhasilan pendidikan juga bertumpu pada kesehatan yang baik. Peran gandanya sebagai *input* maupun *output* menyebabkan pendidikan sangat penting dalam mencapai kehidupan yang layak.

Perkembangan Angka Melek Huruf di 10 Provinsi Indonesia dapat dilihat pada Grafik berikut ini:



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 1.4
Grafik Perkembangan Angka Melek Huruf

Berdasarkan grafik diatas, diketahui bahwa perkembangan Angka Melek Huruf mengalami peningkatan setiap tahunnya pada 4 Provinsi Indonesia yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kep. Riau dan Maluku. Hal ini berarti di 4 Provinsi tersebut Pendidikan yang diterima sudah efektif. Namun 6 Provinsi lainnya

masih diperlukan perhatian lebih lanjut pada pendidikan, sehingga angka melek huruf menjadi meningkat setiap tahunnya. Seperti halnya di Provinsi Kep. Bangka Belitung, dimana pada tahun 2018 jumlah angka melek huruf sebesar 97,96 mengalami penurunan sebesar 2.03% dari tahun sebelumnya, kemudian di ikuti dengan peningkatan kembali di tahun 2019-2021 sebesar 98,10%. Begitu juga dengan Provinsi Papua Barat, dimana Angka Melek Huruf berada di 97%. Di ikuti Maluku berada di 99%, Sulawesi Utara juga berada di 99% terus saja mengalami peningkatan di tahun 2020-2021.

Studi-studi tentang tingkat pengangguran terbuka sudah pernah diteliti sebelumnya seperti hasil penelitian Khotimah (2018) menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran. Tingkat pendidikan dapat menurunkan jumlah pengangguran. Untuk melihat kualitas sumber daya manusia suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikannya, apabila tingkat pendidikan tinggi maka dianggap memiliki kualitas SDM yang baik.

Sapitri (2018) menyatakan bahwa semakin tinggi upah minimum yang ditetapkan pemerintah provinsi lampung akan meningkatkan tingkat pengangguran terdidik. Hal ini mengakibatkan terjadinya kekakuan upah. Tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap pengangguran, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan maka tingkat pengangguran akan meningkat satu satuan. Cahyani (2016) menjelaskan bahwa peningkatan upah dapat mengakibatkan perusahaan mensubstitusikan tenaga kerja dengan modal sehingga menyebabkan kuantitas tenaga kerja yang di minta menurun. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hukum permintaan pasar tenaga kerja yaitu, apabila upah pasar naik maka

kuantitas tenaga kerja yang diminta akan menurun, dan apabila upah pasar turun maka kuantitas tenaga kerja yang diminta akan meningkat. Pramudjasi, dkk (2019) dan Wardiansyah, M. dkk (2016) menyatakan bahwa upah berpengaruh negatif terhadap pengangguran di Kabupaten Paser. Artinya jika upah naik satu satuan maka akan menurunkan pengangguran. Sedangkan variabel tidak berpengaruh signifikan, berapapun tinggi/rendahnya pendidikan tidak akan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran.

Berdasarkan studi terdahulu yang pernah dilakukan, semuanya membahas mengenai tingkat pengangguran terbuka. Yang membedakan penelitian sebelumnya atau terdahulu dengan penelitian penulis adalah terdapat pada model analisis yang digunakan yaitu regresi data panel. Kemudian yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis juga terdapat pada objek penelitian dan periode yang digunakan dalam penelitian. Kemudian periode yang penulis gunakan terhitung dari tahun 2017-2021 dan tidak mengukur dalam bentuk kuartal akan tetapi dalam bentuk tahunan. Alat analisis yang digunakan oleh penulis berbeda dengan alat analisis yang digunakan peneliti sebelumnya, dan juga hasil penelitian penulis yang menyatakan berpengaruh hanya pertumbuhan ekonomi dan investasi saja.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penyebab pengangguran terbuka mengalami fluktuasi di 10 Provinsi Indonesia. Alasan penulis mengambil 10 Povinsi dikarenakan tingkat pengangguran terbuka dan angka melek hurufnya cukup tinggi, sehingga penulis mengambil penelitian dengan judul **“Pengaruh Upah Minimum**

Provinsi (UMP), Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Angka Melek Huruf (AMH) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di 10 Provinsi Indonesia”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka peneliti merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di 10 Provinsi Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di 10 Provinsi Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh Investasi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di 10 Provinsi Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh Angka Melek Huruf (AMH) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di 10 Provinsi Indonesia?
5. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP), Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Angka Melek Huruf (AMH) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di 10 Provinsi Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di 10 Provinsi Indonesia.

2. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di 10 Provinsi Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh Investasi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di 10 Provinsi Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh Angka Melek Huruf (AMH) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di 10 Provinsi Indonesia.
5. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP), Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Angka Melek Huruf (AMH) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di 10 Provinsi Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Suatu penelitian ilmiah tentunya dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis seperti berikut ini:

a. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi serta dapat menambah ilmu pengetahuan.
2. Penelitian ini bisa bermanfaat untuk jadi pembandingan dengan penelitian yang hampir sama selanjutnya.
3. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran akademik.
4. Penelitian ini bisa menjadi salah satu sumber untuk dapat mengetahui pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP), Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Angka Melek Huruf (AMH) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di 10 Provinsi Indonesia.

b. Manfaat Dinamis

1. Untuk peneliti, penelitian ini sebagai salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.
2. Bagi pelajar, untuk memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP), Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Angka Melek Huruf (AMH) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di 10 Provinsi Indonesia.
3. Bagi pemerintah sebagai bahan masukan dalam menganalisa mengenai pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP), Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Angka Melek Huruf (AMH) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di 10 Provinsi Indonesia.